

## RINGKASAN

LARAS DIASTIKA PUTRI, Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Nama CV (*Commanditaire Vennotschap*) Dalam Lelang Pekerjaan Konstruksi, Komisi Pembimbing, Pembimbing I : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Pembimbing II : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Perjanjian pinjam nama CV (*Commanditaire Vennotschap*) merupakan salah satu contoh dari perjanjian *nominee*. Perjanjian *Nominee* adalah salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, lahirnya perjanjian ini dalam praktiknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian serta harus memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam lelang pekerjaan konstruksi praktik perjanjian pinjam nama CV sering sekali dilakukan oleh para pelaku usaha baik pembuatannya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan), sehingga perjanjian pinjam nama CV tersebut seakan-akan pihak yang meminjam adalah sebagai pemegang saham, ataupun direktur sebuah perusahaan dan lain-lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. Pinjam nama ini menjadi permasalahan saat peminjam tidak perform sebagaimana seharusnya baik melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam nama CV atau pinjam bendera CV dalam praktek lelang konstruksi dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik CV yang di pinjam nama perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian preskriptif, metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen, metode analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perjanjian pinjam nama CV tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya pada syarat yang keempat yaitu suatu sebab atau causa yang halal. Causa dalam perjanjian pinjam nama CV tersebut merupakan causa palsu, karena causa yang dilanggar bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 87 ayat (3), dimana penyedia barang/jasa telah mengalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain. Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, hal yang dilanggar adalah pemalsuan salah satu surat dukungan alat milik PT Panca Karya Sentosa yang dilakukan oleh pihak peminjam. Terdapat dua akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya. Akibat hukum secara perdata yaitu, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan akibat hukum secara administrasi yaitu CV tersebut tercantum dalam daftar hitam atau blacklist selama 2 tahun.

Kata kunci : Perjanjian *nominee*, Perjanjian Pinjam Nama CV, CV (*Commanditaire Vennotschap*), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## SUMMARY

LARAS DIASTIKA PUTRI, Master of Law Study Program-Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Juridical Analysis of CV (Commanditaire Vennotschap) Name Loan Agreements in Construction Work Auctions, Advisory Commission, Advisor I : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Advisor II : Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum.

The CV (Commanditaire Vennotschap) loan agreement is an example of a nominee agreement. Nominee agreement is one type of innominate agreement or an anonymous agreement that is not regulated in the Civil Code, the birth of this agreement in practice is based on the principle of freedom of contract in entering into agreements and must meet the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Government procurement of goods/services, especially in construction work auctions, the practice of borrowing the name of the CV agreement is often carried out by business actors, both in writing and in writing (verbal), so that the loan agreement for the name of the CV is as if the borrowing party is the holder of the contract. shares, or directors of a company and others, while the legal action is carried out for the purposes or interests of other parties. This name borrowing becomes a problem when the borrower does not perform as it should, either in default or against the law. This study aims to analyze the validity of the CV agreement or borrow the CV flag in the practice of construction auctions and the legal consequences for the owner of the CV whose company name is borrowed. The research method used in this research is normative juridical, prescriptive research type, data collection method literature study and document study, normative qualitative analysis method.

Based on the results of research and discussion that the CV name loan agreement is invalid because it does not meet the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, especially on the fourth condition, namely a lawful cause or cause. The causa in the agreement to borrow the name of the CV is a fake causa, because the causa that is violated is contrary to Presidential Regulation Number 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning the Procurement of Government Goods/Services in Article 87 paragraph (3), where the provider of goods / services have transferred all main work to other parties. And contrary to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14 of 2020 concerning Standard Guidelines for Procurement of Construction Services Through Providers in Article 118 paragraph (2) letter a, the thing that was violated was the falsification of one of the letters of support for tools belonging to PT Panca Karya Sentosa carried out by the borrower. There are two legal consequences for the owner of a CV whose company name is borrowed. Civil legal consequences, namely, default and unlawful acts and administrative legal consequences, namely the CV is listed on a black list or blacklist for 2 years.

Keywords: Nominee agreement, CV Name Borrowing Agreement, CV (Commanditaire Vennotschap), Government Procurement of Goods/Services.